

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka, ini adalah sebagai sebuah alternatif untuk menggambarkan hubungan topik antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk mencegah terjadinya pengulangan atau kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Berikut adalah beberapa rangkuman penelitian yang terkait dengan pembahasan penelitian yang diserahkan.

1. Penelitian R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Agung Satrio Nugroho (2017)¹

Penelitian yang dilakukan R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Agung Satrio Nugroho berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak Kepremanan Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan sosio-legal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tindakan kepremanan yang dilakukan oleh pengamen di kota lima semarang, dan mengetahui upaya penanggulangan tindakan kepremanan di lokasi yang sama.

Topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas kepremanan yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota

¹ Nugroho, A. S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). Tinjauan kriminologis tindak premanisme oleh pengamen di simpang lima kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-19.

Semarang dan penanggulangannya. Perbuatan menyimpang tersebut antara lain pemerasan dan mabuk-mabukan di depan umum saat membawa kendaraan. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan mengganggu ketertiban. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu ada beberapa alasan dan tujuan atas aktivitas yang mereka lakukan, dimana salah satunya adalah tanggung jawab untuk mendistribusikan laba kepada salah satu koordinator atau pemimpin mereka.

2. Penelitian oleh Achmad Fachri Fadlullah Salis dan Priyatno Harsasto (2018)²

Penelitian yang dilakukan oleh A.F. Fadlullah Salis dan Priyatno Harsasto (2018) berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Tanah Abang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana ia melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Kebijakan Publik, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja penyebab pengaruh pada pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang.

² Salis, A. F. F., & Harsasto, P. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Tanah Abang. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(1), 21-30.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti membuat hasil yaitu faktor penyebab utama adalah kondisi lingkungan yang ada dimana aksi kepreman yang menjadi aktor utama untuk penyalahgunaan trotoar, karena di kasus penyalahgunaan fungsi trotoar di tanah abang ini adalah aksi kepreman yang menyediakan lahan parkir di atas trotoar, juga memperbolehkan dan mengatur pedagang yang akan berjualan di atas trotoar. Selain itu, kondisi sosial yang masih rendah dan kesadaran masyarakat yang rendah juga menjadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan fungsi trotoar di Tanah Abang.

3. Penelitian Agustine Dwi Windya Sari, M. Arif Sahlepi Lubis, dan Suci Ramadani (2020)³

Penelitian yang dilakukan oleh Agustine Dwi Windya Sari, M. Arif Sahlepi Lubis, dan Suci Ramadani (2020) berjudul “Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Kepreman Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dengan Kekerasan Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)”. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dimana merupakan sebuah jenis penelitian hukum sosiologis, dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan kepreman yaitu pungli atau pungutan liar dengan kekerasan di Kota Medan, dan bagaimana proses

³ Sari, Agustine Dwi Windya, M. Arif Sahlepi Lubis, and M. SH. "Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dengan Kekerasan Di kota Medan." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains 2* (2020).

hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penerapan sanksi pada preman tersebut.

Dalam penelitian tersebut, terdapat kesimpulan yaitu bagaimana aparat penegak huku, memberantas tindak pidana Pungli terkait Perampokan di wilayah kota Medan dengan melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan kepada para pelaku tindakan pungli tersebut, juga terdapat upaya penindakan terhadap pelaku aktivitas pungutan liar dengan kekerasan, dengan dilakukannya sanksi pidana.

4. Penelitian Arief Rachman Sacipta (2018)⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Rachman Sacipta (2018) berjudul “Konstruksi Sosial Preman (Studi Kasus Preman di Terminal Kampung Rambutan)”. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teori konstruksi sosial dan konsep-konsep dari Peter L Berger dan Luckmann. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Arief Rachman Sacipta ini adalah untuk melihat bagaimana proses eksternalisasi dan objektivikasi konstruksi sosial preman yang terdapat di Terminal Kampung Rambutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang terminal menciptakan sebuah predikat “Preman Jenis Baru” dimana preman tersebut bersifat sebagai mitra kerja bagi aparat pemerintah, pihak swasta, dan orang-

⁴ Sacipta, Arief Rachman. "Konstruksi sosial preman (studi kasus preman di terminal kampung rambutan)." Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.

orang terminal, dimana sampai pada tahap dibentuknya kelembagaan resmi yaitu “Kowan Bisata” sebagai sebuah wadah bagi mereka.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	PENULIS/TAHUN	METODE PENELITIAN	HASIL TEMUAN
1.	Tinjauan Kriminologis Tindak Kepremanan Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang	R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, Agung Satrio Nugroho (2017)	Kualitatif	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu ada beberapa alasan dan tujuan atas aktivitas yang mereka lakukan, dimana salah satunya adalah tanggung jawab untuk mendistribusikan laba kepada salah satu koordinator atau pemimpin mereka.

2.	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Tanah Abang</p>	<p>Achmad Fachri Fadlullah Salis, Priyatno Harsasto (2018)</p>	Kualitatif	<p>Faktor penyebab utama adalah kondisi lingkungan yang ada dimana aksi kepreman yang menjadi aktor utama untuk penyalahgunaan trotoar, karena di kasus penyalahgunaan fungsi trotoar di tanah abang ini adalah aksi kepreman yang menyediakan lahan parkir diatas trotoar, juga memperbolehkan dan mengatur pedagang yang</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				akan berjualan di atas trotoar.
3.	Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Kepreman Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dengan Kekerasan Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)	Agustine Dwi Windya Sari, M. Arif Sahlepi Lubis, Suci Ramadani (2020)	Sosio-legal	Terdapat kesimpulan yaitu bagaimana aparat penegak hukum, memberantas tindak pidana Pungli terkait Perampokan di wilayah kota Medan dengan melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan kepada para pelaku tindakan pungli tersebut, juga terdapat upaya penindakan terhadap pelaku aktivitas pungutan liar dengan

				kekerasan, dengan dilakukannya sanksi pidana.
4.	Konstruksi Sosial Preman (Studi Kasus di Preman Terminal Kampung Rambutan)	Arief Rachman Sacipta (2018)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang terminal menciptakan sebuah predikat “Preman Jenis Baru” dimana preman tersebut bersifat sebagai mitra kerja bagi aparat pemerintah, pihak swasta, dan orang-orang terminal, dimana sampai pada tahap dibentuknya kelembagaan

			resmi yaitu “Kowan Bisata” sebagai sebuah wadah bagi mereka.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------

2.2 Kerangka Konsep dan Teori

2.2.1 Kepremanan

Kepremanan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan pasar. Orang yang melakukan tindakan kepremanan tersebut sering disebut sebagai preman. Pada awalnya, preman berasal dari bahasa belanda *vrijman* yang artinya adalah orang bebas, merdeka, dimana pada dahulu memperjuangkan hak-hak kaum pribumi dan sangat dihargai serta dihormati.⁵ Akan tetapi, pekerjaan preman berubah menjadi pekerjaan yang tidak dihargai bahkan dipandang sebelah mata, ditambah lagi karena stigma buruk yang melekat sejak era orde baru.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), preman adalah sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya). Di samping itu, terdapat serta yang menginterpretasikan kepremanan sebagai suatu kelakuan yang dijalani oleh segerombol orang

⁵ Nugroho, Agung Satrio, R. B. Sularto, and Budhi Wisaksono. 2017. *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang*. Diponegoro Law Journal 6, no. 1 : 1-19. Hal 2

pada perseorangan dengan mengenakan cara-cara kekerasan serta mengarah pada pelanggaran poin, norma juga melanggar hukum yang sah di tengah-tengah publik. Menurut Jerome Tadie, kata-kata preman pertama kali muncul dengan konotasi kriminal adalah dalam sebuah serial detektif kala itu yang berjudul *Ali Topan Detektif Partikelir*. Sampai saat ini, penggunaan label dan simbol “Preman” melekat pada seseorang yang sering melakukan kejahatan seperti pemerasan, melakukan pungli (pungutan liar), dan memalak warga di pasar dan ruang publik lainnya di kota.⁶

Praktek kepreman cenderung tumbuh di lingkungan-lingkungan kehidupan manusia, apalagi pada kawasan terjadinya praktik ekonomi. Menurut pandangan sosiologis, munculnya kepreman terjadi karena adanya kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat, dimana kesenjangan ini dapat berbentuk material dan juga ketidak sesuaian dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat.

Praktik kepreman sendiri mempunyai hubungan dengan adanya pertumbuhan secara finansial masyarakat yang tidak seimbang, sehingga dapat menumbuhkan kecemburuan sosial, ketegangan hofup, serta kebrutalan sosial. Disini, dapat dikatakan bahwa praktik kepreman muncul dengan adanya beberapa latar belakang atau sebab yaitu penyebab ekonomi. Ekonomi yang terjepit dan sulitnya memenuhi

⁶ Tadie, J., 2009. *Wilayah kekerasan di Jakarta*. Rahayu S. Hidayat. Depok : Masup Jakarta. Hal 213

kualifikasi pada lapangan kerja dapat membuat seseorang untuk melakukan tindakan kepremanan, dengan arti lain memaksa seseorang untuk mendapatkan pendapatan atau uang dengan cara menindas, mencuri, menodong dan melakukan tindakan-tindakan kepremanan lainnya.

Penjelasan mengenai bentuk tindakan kepremanan dewasa ini lebih banyak merujuk pada data-data dari internet yang berisi pandangan individu dan bersifat subjektif. Selama penulis melakukan observasi, ada beberapa bentuk tindakan kepremanan yang dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Tindakan Psikis

Tindakan kepremanan ini bersifat menyerang psikologi seseorang, seperti meneror, mengganggu ketenangan dan melakukan tindakan seperti mengancam, menekan, dan tindakan lainnya.

2. Tindakan Fisik

Tindakan kepremanan kategori ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang preman dengan menggunakan fisik mereka, seperti memukul, merampas, menendang, bahkan sampai melakukan tindakan pembunuhan.

2.2.2 Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar-

individu berdasarkan tatanan sosial tertentu.⁷ Adapun objek yang dipertukarkan itu bukanlah benda yang nyata, melainkan menyangkut juga hal-hal yang tidak nyata. Ide tentang pertukaran itu juga yang menyangkut perasaan sakit, beban hidup, harapan, pencapaian sesuatu, dan pernyataan-pernyataan antar individu.

Teori pertukaran sosial melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (reciprocal). Karena lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (reward), pengorbanan (cost) dan keuntungan (profit). Asumsi-asumsi yang dibuat oleh teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar dari suatu hubungan⁸ :

a. Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan ketika seorang partisipan mengambil suatu tindakan, baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena akibat.

b. Kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan. Secara khusus waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan

⁷ Mighfar, S. (2015). Social Exchange Theory: Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 9(2), 259-282.

⁸ *ibid*

pengorbanan, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya.

Teori pertukaran sosial ini di kemukakan oleh George Caspar Homans dimana ia melihat sifat behaviorisme manusia. Sifat behaviorisme pada masyarakat yang dimaksud adalah melihatnya melalui sifat alamiah dari spesies manusia, atau sifat objektif psikologis manusia. Menurut Homans, sifat dasar dari manusia itu sendiri ialah menginginkan kesenangan yang sebesar-besarnya dan meminimalkan kesusahannya. Begitu juga dalam masyarakat, dimana sifat manusia tersebut mengkonstruksikan dunia sosial dengan manusia sebagai pusatnya. Sifat dasar yang dimaksudkan disini bersifat pertukaran, karena berapa besarnya keuntungan sudah menjadi sifat dasar dari spesies manusia untuk mencari keuntungan yang sebgai manusia mencarinya melalui altruisme dan yang lainnya melalui keegoisan.⁹ Teori pertukaran sosial ini bisa digunakan untuk meneliti fenomena hubungan sosial seseorang atau kelompok yang pindah atau berganti teman atau afiliasi kelompok.

2.2.3 Teori Anomie

Emile Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada

⁹ William D. Perdue. *Sociological Theory: Explanation, Paradigm, and Ideology*. (Palo Alto, Calif.: Mayfield, 1986), hlm. 133.

masyarakat sehingga orang lain dan keadaan ini menyebabkan penyimpangan dan perbedaan dalam berperilaku. Durkheim menyatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang menggoncangkan perasaan hati nurani yang sehat dari setiap masyarakat yang beradab.¹⁰

Durkheim memperkenalkan istilah anomie yaitu suatu keadaan dimana tanpa norma atau tanpa harapan, yang tercipta karena adanya penurunan kemampuan masyarakat untuk mengatur hasrat alamiah dari individu. Anomie didefinisikan sebagai suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan kultural dengan kenyataan sosial.

Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu:¹¹

1. Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*).
2. Keberadaan manusia sebagai makhluk (*human being is a social animal*).
3. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral connections*).

Konsep anomie yang di gambarkan oleh Emile Durkheim yaitu mengangap bahwa dalam dalam tatanan kehidupan masyarakat

¹⁰ Hisyam, Ciek Julyati dan Abdul Rahman Hamid. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. LPP Universitas Negeri Jakarta. 2014. Hal. 99

¹¹ Lilik mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, teoritis, dan Praktik*, PT. Alumni. Bandung. Hal. 324

terdapat individu-individu yang berperilaku anomie yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan yang dihasilkan oleh berbagai ketegangan dalam suatu struktur sosial sehingga menyebabkan timbulnya perilaku anomie yang dilakukan oleh individu-individu.

Sementara itu, Robert K. Merton mengkonsepkan anomie sebagai sebuah ketidaksuaian atau situasi saat timbulnya perbedaan antara tuuan budaya dan *institutional means* sebagai akibat dari bagaimana cara masyarakat diatur, karena adanya pembagian kelas, dalam hal ini pada struktur masyarakat. Merton mencoba untuk menjembatani konsep anomie dengan tindakan *deviant behaviour* atau perilaku menyimpang¹². Ia mempunyai pandangan bahwa individu mempelajari untuk mengenal tujuan-tujuan dalam kebudayaan dan juga bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut sebagai akibat dari proses sosialisasi. Perilaku menyimpang tersebut dapat muncul sebagai alternatif apabila kesempatan-kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut tidak ada. Menurut Robert K. Merton, ada empat tipe perilaku menyimpang yang muncul akibat situasi yang sudah dijelaskan di atas¹³:

1. Inovasi

Tipe perilaku ini terjadi saat ada seseorang yang menerima cara pencapaian tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, sambil

¹² Suyato, Suyato. "Perilaku menyimpang dalam perspektif sosiologis." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005). Hal. 2

¹³ *Ibid.* Hal. 3

melakukan penolakan dengan nilai yang bertentangan. Contohnya adalah pencuri yang ingin memperkaya diri seperti anggota masyarakat yang lain. Akan tetapi apabila masyarakat lain memperkaya diri dengan bekerja, para pencuri dapat merubah aturan tersebut menjadi mencuri yang bisa memperkaya diri mereka.

2. Ritualisme

Perilaku ini terjadi saat seseorang menjalani dan menerima nilai secara kultural, akan tetapi menolak tujuan kebudayaan.

3. Penarikan Diri

Perilaku pengasingan diri terjadi saat seseorang menolak tujuan yang sudah diterima oleh kebudayaan, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Pemberontakan

Perilaku ini terjadi saat seseorang menolak sarana dan tujuan yang divalidkan oleh kebudayaan dan digantikan dengan yang lain.

2.2.4 Teori Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang atau *deviant behaviour* adalah semua tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tata sosial masyarakat.¹⁴ Selain itu, perilaku menyimpang didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang

¹⁴ Hisyam, Ciek Julyati. 2021. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara. Hal. 2

atau beberapa orang anggota masyarakat, secara sadar atau tidak sadar yang bertentangan dengan norma dan aturan yang telah disepakati bersama, yang dapat menimbulkan korban mauapun tidak ada korban. Ada beberapa definisi mengenai perilaku menyimpang dalam Hisyam (2021:4)¹⁵, yaitu :

1. Robert M. Z. Lawang

Penyimpangan berarti suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial, dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau abnormal tersebut.

2. Gillin and Gillin

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga dan masyarakat, yang menjadi penyebab memudarnya ikatan atau solidaritas kelompok.

3. Bruce J. Cohen

Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri, dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok yang akhirnya pelaku dikenai sanksi.

Perilaku menyimpang pada dasarnya bersifat relatif dimana perilaku menyimpang itu mempunyai empat unsur dasar sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan atau tindakan.

¹⁵ *Ibid.* Hal 4

2. Dilakukan secara sadar atau secara tidak disadari oleh individu atau sekelompok individu.
3. Melanggar norma atau nilai sosial yang diakui masyarakat.
4. Pelaku mendapat sanksi dari pihak yang berwenang.

Dalam melihat bagaimana perilaku menyimpang tersebut berlaku pada kehidupan bermasyarakat, terdapat lima faktor yang menjelaskan bagaimana perilaku menyimpang dapat terjadi dalam kehidupan bermasyarakat menurut Henslin (2016), yaitu :

1. Faktor *Differential Association*

Pola pergaulan yang berbeda mengimplikasi perilaku menyimpang menurut teori ini. Teori ini melihat bagaimana perilaku menyimpang terjadi melalui proses-proses alih budaya atau *cultural transformation*.

2. Faktor Pelabelan (*labelling*)

Teori ini melihat bagaimana akibat dari proses *labeling* sehingga mengakibatkan individu atau kelompok melakukan perilaku menyimpang. Label diartikan sebagai sebuah atribut yang melekat dengan individu ataupun kelompok yang dapat berupa julukan, cap, etiket serta merek yang diberikan oleh masyarakat, sehingga proses pelabelan tersebut mengalami internalisasi sehingga menjadi sebuah alasan atau dasar untuk melakukan perilaku menyimpang.

3. Faktor Struktur Sosial

Menurut Robert K. Merton, perilaku menyimpang berasal dari struktur sosial yang berpotensi untuk menghasilkan suatu perilaku konformis dimana perilaku menyimpang tersebut merupakan sebuah bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu.

4. Faktor Fungsional

Faktor ini dikemukakan oleh Durkheim dimana Durkheim berpendapat bahwa kesadaran moral setiap anggota masyarakat tidak mungkin terjadi karena setiap individu adalah *unique* dan memiliki perbedaan karakter akibat berbagai faktor, seperti lingkungan, keturunan, dan kehidupan sosialnya sehingga memberikan sebuah konsekuensi bagi sistem sosial, karena perilaku menyimpang dipastikan selalu ada dan merupakan keperluan yang nyata bagi tatanan sosial agar moralitas, norma, dan hukum berkembang terus secara formal.

5. Faktor Konflik

Teori yang dicetuskan oleh Karl Marx ini berdasar pada pandangan Marx terhadap kapitalisme yang berkembang pesat di Barat pasca revolusi industri. Teori ini menganggap perilaku menyimpang hanya muncul dalam pandangan kelas yang berkuasa (*borjuis*) untuk melindungi kepentingan dan modal mereka. Pernyataan Marx pada teori ini adalah perilaku menyimpang dapat berkembang dan berkembang sebagai sebuah tindak pidana, tatkala dilakukan oleh golongan-golongan lemah (*proletar*).

Perilaku menyimpang dapat menjadi suatu jembatan kepada seorang individu untuk melakukan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang dapat terjadi seperti sebagai berikut :

1. Tawuran atau perkelahian antarpelajar

Perkelahian termasuk jenis kenakalan remaja akibat kompleksnya kehidupan kota yang disebabkan karena masalah sepele.

2. Penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang dan minuman keras

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba dan narkoba tanpa izin dengan tujuan hanya untuk memperoleh kenikmatan. Penyimpangan sosial yang timbul adalah pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan.

3. Hubungan seksual

Hubungan seks di luar nikah, pelacuran dan HIV/AIDS merupakan penyimpangan sosial karena menyimpang norma sosial maupun agama.

4. Tindak kriminalitas

Tindak kriminal adalah tindak kejahatan atau tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama. Misalnya: mencuri, menodong, menjambret, membunuh, dan lain-lain. Disebabkan karena masalah kesulitan ekonomi. Dan merupakan profesi atau pekerjaannya karena sulit mencari pekerjaan yang halal. Ada 5 jenis kejahatan:

1. Kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) adalah kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Contohnya berjudi, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya.

2. Kejahatan terorganisir (*organized crime*) adalah pelaku kejahatan merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Contohnya komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur.

3. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah kejahatan yang mengacu pada kejahatan orang-orang terpandang atau berstatus tinggi. Contohnya korupsi, kolusi.

4. Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang golongan rendah. Contohnya mencuri jemuran, sandal di masjid dan sebagainya.

5. Kejahatan korporat (*corporate crime*) adalah jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Contohnya, suatu perusahaan membuang limbah beracun ke sungai yang mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai jenis penyakit.

2.2.5 Teori *Organized Crime* (Kejahatan Terorganisir)

Kejahatan terorganisir ada mempunyai penjelasan dasar yaitu sebuah entitas pembedahan usaha atau bisnis illegal dengan anggota yang mempunyai pandangan yang sama dalam memperoleh profit atau keuntungan yang didalamnya ada jalinan dalam wujud menjadi suatu lembaga. Konstruksi yang tercipta dalam organisasi ini mempunyai hirarki serta tujuan yang sesuai yakni memperoleh profit serta keuntungan dari aktivitas-aktivitas illegal¹⁶ Selain itu, ada beberapa pendapat ahli mengenai *organized crime*, yaitu :

1. J. Albini

Kejahatan terorganisir merupakan aktivitas kriminal berjumlah dua atau lebih individu yang memiliki atau tidak memiliki keahlian. Aktivitas ini memiliki struktur kepemimpinan yang jelas dengan pembagian kerja masing-masing anggota dalam operasinya.

2. Muh. Mustofa

Kejahatan terorganisir merupakan salah satu tipologi kejahatan yang para pelakunya mengadakan sebuah organisasi yang sangat rapi untuk melakukan operasi kejahatan yang berorientasi pada keuntungan dengan jalur ilegal seperti kekerasan, penipuan, pencurian, dan dapat bersifat lokal maupun internasional atau dapat disebut kejahatan transnasional terorganisir.

3. Peter A. Lupsha

¹⁶ Abadinsky, Howard. *Organized crime*. Cengage Learning, 2012. Hal.7

Kejahatan terorganisir ialah kejahatan yang dilakoni oleh grup kriminal yang didalamnya ada pemberian operasi serta keterampilan, dan juga memercayakan pola interaksi spesial antar anggotanya.

Organized crime atau kejahatan yang terorganisir mempunyai ciri-ciri yang dimana kegiatan mereka hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi saja, tanpa ada orientasi lain seperti tujuan politis maupun pada kehidupan sosial. Anggota yang berada dalam kejahatan yang terorganisasi mempunyai kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah kegiatan yang melawan hukum dan ilegal, namun tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

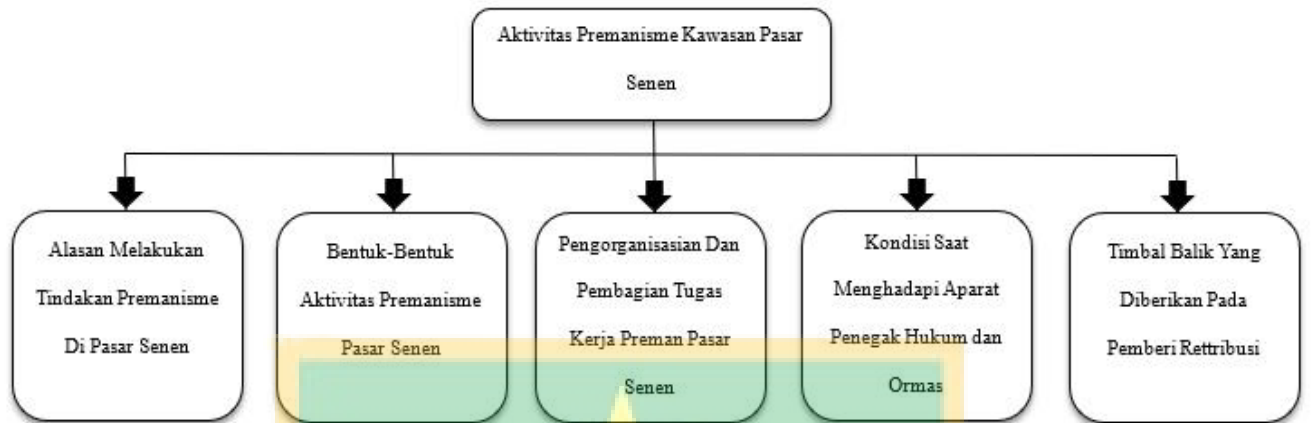
2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Uma Sekaran dalam Sugiyono (2016, hlm. 60). Sedangkan, menurut Suriasumantri dalam Sugiyono¹⁷, kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Dalam sebuah penelitian, kerangka berpikir dijadikan sebagai sarana untuk memberikan suatu arah dan tujuan pada sebuah fenomena yang akan diteliti oleh seorang peneliti yang nantinya akan digunakan untuk

¹⁷ Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. Hal. 60

memecahkan masalah juga termasuk untuk menggambarkan tujuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian, dimana hasil akhirnya akan membuahkan kesimpulan pada penelitian. Kerangka berpikir pada penelitian ini mendeskripsikan terhadap penelitian yang berjudul “Aktivitas Kepremanan di Pasar Senen Jakarta Pusat”.

Adanya kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas kepremanan yang terdapat di Pasar Senen, Jakarta Pusat, dimana peneliti tertarik untuk meneliti aktivitas mereka karena adanya aktivitas tersebut di pusat ekonomi masyarakat, seperti pasar. Selain itu, selama ini kepremanan dianggap sebagai masalah sosial, yang dimana dalam kehidupan sosial masyarakat masih dianggap sebagai tindakan kriminal. Dalam penelitian kali ini yang dilakukan di Pasar Senen, Jakarta Pusat, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana cara kerja mereka, bagaimana kondisi mereka saat menghadapi aparat penegak hukum, bagaimana pengelompokan kerja mereka dan pembagian wilayah kerja mereka, mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut, dan apa timbal balik mereka kepada masyarakat, serta bagaimana bentuk interaksi antar kelompok preman tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

